ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA POLITEKNIK MALAHAYATI ACEH TAHUN ANGGARAN 2018-2020

SKRIPSI

OLEH :

ZAHRATUL FITRI
NPM : 1802110069

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 15 September 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ZAHRATUL FITRI
NPM: 1802110069

Dengan judul:

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA POLITEKNIK MALAHAYATI ACEH TAHUN ANGGARAN 2018-2020

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi Akuntansi	Pembimbing I	Pembimbing II
H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.	**Elviza, SE, M.Si.**	**Emmi Suryani Nst, SE, M.Si.**
NIK. 19711019 200405 1 001	**NIK. 19840405 201112 2 001**	**NIK. 19800301 200610 2 001**

Mengetahui,
Dekan,

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 15 September 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ZAHRATUL FITRI
NPM: 1802110069

Dengan judul:

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA POLITEKNIK MALAHAYATI ACEH TAHUN ANGGARAN 2018-2020

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 12 September 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Elviza, SE, M.Si.
NIK. 19840405 201112 2 001

Anggota

Emmi Suryani Nst, SE, M.Si.
NIK. 19800301 200610 2 001

Anggota

Ermad MJ, SE, M.Si.
NIK. 19871606 201608 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 15 September 2022

Yang Menyatakan

ZAHRATUL FITRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	**: Zahratul Fitri**
NPM	**: 1802110069**
Program Studi	**: Akuntansi**
Fakultas	**: Ekonomi**
Jenis Karya	**: Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA POLITEKNIK MALAHAYATI ACEH TAHUN ANGGARAN 2018-2020

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 15 September 2022

Banda Aceh, 15 September 2022
Yang Menyatakan

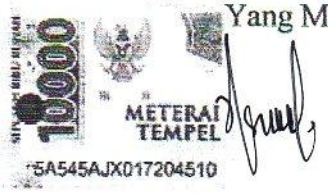

ZAHRATUL FITRI

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **"ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA POLITEKNIK MALAHAYATI ACEH TAHUN ANGGARAN 2018-2020".** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Ayahnda dan Ibunda serta keluarga tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapai cita citanya.
2. Bapak Drs, Tarmizi Gadeng, SE,M,Si,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar,SE,M,Si,Ak,CA. Selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Ibu Elviza,SE,M,Si dan Ibu Emmi Suryani Nst. SE.M.Si Selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu dalam mengarahkan penelitian ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi khususnya staf pengajar pada jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Rekan-rekan satu angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan karya ilmiah ini.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu serta mengajarkan penulis untuk bisa segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan dari semua pihak demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah meridhainya. Amin.

Banda Aceh, 15 Mei 2022

Zahratul Fitri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 10
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Manfaat Penelitian 10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **12**

2.1 Akuntansi Sektor Publik 12
2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik 12
2.1.2 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik 13
2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah 14
2.1.4 Fungsi dan Tujuan laporan Keuangan Sektor Publik 17
2.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 18
2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 19
2.4 Kinerja 20
2.4.1 Pengertian Kinerja 20
2.4.2 Pengertian Kinerja Anggaran 22
2.4.3 Tujuan Pengukuran Kinerja 23
2.4.4 Manfaat Pengukuran Kinerja 24
2.5 Anggaran 24
2.5.1 Pengertian Anggaran 24
2.5.2 Tujuan Anggaran 25
2.5.3 Fungsi Anggaran 27
2.6 Analisis Menilai Kinerja Keuangan Negara 27
2.7 Definisi Kinerja Anggaran 28
2.8 Laporan Realisasi Anggaran 29
2.8.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran 29
2.9 Belanja 31
2.9.1 Pengertian Belanja 31
2.10 Analisis Rasio Keuangan Belanja 34

2.11 Penelitian Sebelumnya 37
2.12 Kerangka Pemikiran 43

BAB III METODE PENELITIAN 46
3.1 Desain Penelitian 46
3.1.1 Tujuan Studi 46
3.1.2 Jenis Penelitian 46
3.1.3 Horizon Waktu 46
3.1.4 Unit Analisis 47
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 47
3.3 Teknik Analisis Data 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
4.1 Gambaran Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh 51
4.1.1 Sejarah Berdirinya Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh ... 51
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh 53
4.1.3 Visi dan Misi Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh 54
4.1.4 Budaya BLU Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh 55
4.1.5 Struktur Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh 55
4.2 Hasil Penelitian 56
4.2.1 Analisis Pertumbuhan Belanja 57
4.2.2 Analisis Belanja Operasional Terhadap Total Belanja 59
4.2.3 Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja Negara 61
4.2.4 Rasio Efisiensi Belanja 63
4.2.5 Rasio Efektivitas Belanja 65
4.3 Pembahasan 67
4.3.1 Analisis Kinerja Anggaran Belanja dengan Menggunakan Analisis Pertumbuhan Belanja Pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh 67
4.3.2 Analisis Kinerja Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Analisis Belanja Operasional terhadap Belanja Pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh 69
4.3.3 Analisis Kinerja Anggaran Belanja dengan Menggunakan Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja Negara pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh 70
4.3.4 Analisis Kinerja Anggaran Belanja dengan Menggunakan Rasio Efisiensi Belanja pada Politeknik Malahayati Aceh 70
4.3.5 Analisis Kinerja Anggaran Belanja dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Belanja pada Politeknik Malahayati Aceh . 71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 73
5.1 Kesimpulan 73
5.2 Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Belanja Pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2018-2020 8

Tabel 2.1 Penelitian sebelumnya 42

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2018-2020 56

Tabel 4.2 Pertumbuhan Belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun 2018-2020 58

Tabel 4.3 Belanja Operasional Terhadap Total belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun 2018-2020 60

Tabel 4.4 Belanja Modal Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun 2018-2020 61

Tabel 4.5 Kriteria Tingkat Efisiensi 63

Tabel 4.6 Efisiensi Belanja Politeknik Pelayaran malahayati Aceh 64

Tabel 4.7 Kriteria Tingkat Efektivitas 66

Tabel 4.8 Efektivitas Belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun 2018-2020 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 45

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA POLITEKNIK MALAHAYATI ACEH TAHUN ANGGARAN 2018-2020

ZAHRATUL FITRI
NPM : 1802110069

Pembimbing I : Elviza, SE, M.Si
Pembimbing II : Emmy Suryani.Nst, SE. M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun 2018-2020. Objek dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun 2018-2020. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran dengan teknik analisis datanya bersifat deskriptif.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Analisis kinerja Anggaran Belanja dengan menggunakan Analisis Pertumbuhan Belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Pada tahun 2018 pertumbuhan belanja sebesar -2,73%. Pada tahun 2019 sebesar -18,81%. Sedangkan Pada tahun 2020 sebesar -32,44%. Analisis kinerja Anggaran Belanja dengan menggunakan Analisis Belanja Operasional Terhadap Total Belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Pada tahun 2018 anggaran belanja operasional sebesar 71,40%. Kemudian Pada tahun 2019 sebesar 86,66%. Sedangkan Pada tahun 2020 sebesar 97,56%. Analisis kinerja Anggaran Belanja dengan menggunakan Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Negara Pada tahun 2018 anggaran belanja modal Aceh sebesar 27,89%. Pada tahun 2019 sebesar 13,28%. Pada tahun 2020 sebesar 2,12%. Tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh bahwa dari tahun 2018 termasuk kategori cukup efisien karean nilai rasionya berkisar antara 80-90%. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 termasuk kategori kurang efisien karena nilai rasionya berkisar antara 90-100%.

Kata Kunci : Kinerja, Anggaran Belanja, dan Laporan Realisasi Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu cara pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, penatausaha akuntansi, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kesuksesan suatu otonomi daerah tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengelola keuangan melalui pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah, serta menunjukkan bahwa anggaran publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disusun berdasarkan siklus anggaran. Siklus dan mekanisme APBN ini meliputi tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah, tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat, tahap pelaksanaan APBN, tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Anggaran merupakan rencana kegiatan yang di persentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Setiap anggaran memberikan

informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara diubah menjadi PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang penggunaan APBN, untuk mendukung percepatan dan modernisasi anggaran secara lebih profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu, dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil akrual yang dicapai. Penyusunan anggaran dalam pembiayaan disuatu instansi pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai sistem perancanaan koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut.

Penyelenggaraan pemerintah tidak lepas dari adanya pengunaaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Setiap tahun juga selalu saja pemerintah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program

dan aktivitas yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran merupakan alat perencanaan target yang harus dicapai oleh pemerintah, serta sebagai alat untuk pengendalian alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislatif untuk nanti dibelanjakan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat. Kinerja adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu instansi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. kinerja adalah tingkat keberhasilan melaksanakan tugas serta kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Kinerja sebagai suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu instansi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. kinerja adalah tingkat keberhasilan melaksanakan tugas serta

kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Anggaran merupakan suatu perencanaan tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan

barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan unit moneter. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen bagi kebijakan pemerintah Pusat yang mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat (Suyatin,2021).

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti Alat Tulis Kantor (ATK), pengadaan atau penggantian peralatan kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok fungsi Kementerian/Lembaga, pengadaan kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur Pemerintah Pusat dan pengeluaran jasa non fisik (contoh biaya pelatihan dan penelitian). pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan asset tetap atau asset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Contoh: pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan Negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya pengukuran kinerja pada belanja

daerah karena ini bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan *output* yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah.

Ditinjau dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah pusat atau daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca LRA menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan yang dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas, Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Mahmudi (2016:135) Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan.

Penganggaran berbasis kinerja pada pemerintahan merupakan cara yang tepat untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi anggaran. Anggaran kinerja

yang berorientasi *input*, *output* dan *outcome* memungkinkan program yang akan disusun dan digunakan untuk mencapai hasil yang akan diinginkan. Program yang disusun berdasarkan anggaran kinerja prioritas yang berkaitan erat dengan visi, misi dan rencana srategis yang ingin dicapai. Sehingga hasil yang dicapai mencerminkan visi, misi suatu organisasi. Komponen anggaran berbasis kinerja adalah indikator kinerja, standar biaya dan pengukuran kinerja. Ketiga hal tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menilai input, output dan *outcame* suatu program yang disusun berdasarkan kinerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Apabila efektivitas dan efisiensi kinerja telah tercapai maka akan tercipta akuntabilitas kinerja yang merupakan visi dari seluruh organisasi sektor publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara diubah menjadi PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang penggunaan APBN, untuk mendukung percepatan dan modernisasi anggaran secara lebih profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2013 Anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Lembaga Negara atau instansi pemerintahan baik itu pusat dan daerah juga menyediakan penganggaran dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program disetiap instansi. Anggaran ini bersumber dari APBN atau APBD. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyatakan bahwa Percepatan pelaksanaan anggaran dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan optimalisasi peran pendapatan dan belanja negara, khususnya pendapatan dan belanja Kementerian Negara atau Lembaga terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan tentang penggunaan anggaran negara atau APBN,

Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh berlokasi di jalan Laksamana Malahayati Aceh KM. 19 Gampong Durung, Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Perhubungan telah telah diresmikan pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 oleh Mentri Perhubungan dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB).

Jumlah anggaran dan realisasi anggaran pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2018-2020 dapat di lihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2018	Pendapatan	32.774.045.000,-	24.234.401.257,-	73,94
	Belanja	132.708.064.000,-	114.881.298.633,-	86,57
2019	Pendapatan	23.578.200.000,-	18.544.587.832,-	78,65
	Belanja	102.462.611.000,-	93.264.465.672,-	91,02
2020	Pendapatan	15.085.695.000,-	22.135.786.857,-	146,73
	Belanja	64.265.515.000,-	63.003.532.769,-	98,03

Sumber : LRA Politeknik Malahayati Aceh Tahun 2018-2020

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat di lihat bahwa realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.32.774.045.000,- atau mencapai 73,94% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.32.774.045.000,-. Sedangkan realisasi belanja Tahun 2018 sebesar Rp. 114.881.298.633,- dari alokasi anggaran sebesar Rp.132.708.064.000,- .Selanjutnya realisasi Pendapatan pada Tahun 2019 berupa pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp.23.578.200.000,- atau mencapai 78,65% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.23.578.200.000,-. Sedangkan realisasi belanja pada Tahun 2019 mencapai Rp.93.264.465.672,- atau mencapai 91,02% dari alokasi anggaran sebesar Rp.102.462.611.000,-. Kemudian realisasi Pendapatan Tahun 2020 dari Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) berupa Pendapatan Jasa Layanan Umum, Pendapatan BLU Lainnya, Pendapatan PNBP Lainnya dan pendapatan dari pelayanan BLU sebesar Rp.15.085.695.000,- atau mencapai 146,73% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.15.085.695.000,- Sedangkan realisasi belanja pada Tahun 2020 mencapai Rp.63.003.532.769,- atau mencapai 98,03% dari alokasi anggaran sebesar Rp.64.265.515.000,-.

Berdasarkan survey awal dan Tabel di atas dapat di ketahui bahwa dari Tahun 2018 sampai Tahun 2020 pada Politeknik Malahayati Aceh selalu mengalami kelebihan (*Surplus*) anggaran, Kelebihan anggaran ini disebabkan dengan kurangnya pemanfaatan anggaran akibat kekurangan belanja tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ditentukan sehingga menyebabkan kelebihan anggaran. Kelebihan anggaran juga disebabkan dengan kurangnya program-program tertentu sehingga kurang pemanfaatan dalam menghabiskan jumlah

anggaran yang telah ditentukan sehingga jumlah anggaran yang untuk tahun selanjutnya akan dibatasi.

Permasalahan yang terjadi pada Politeknik Malahayati Aceh tahun anggaran 2018-2020 perlunya di teliti lebih lanjut bagaimana kinerja anggaran belanja dalam mengelola keuangan dengan baik untuk mencapai efektif, efisien, dalam pelaksaan anggaran belanja. Maka penelitian ini menelusuri lebih dalam tentang pelaksanaan keuangan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh tahun anggaran 2018-2020. Oleh karena itu, maka dilakukanlah penelitian ini yang berjudul :**"Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2018-2020".**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kinerja anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun 2018-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi dalam menganalisis kinerja anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2018-2020.
b. Dapat mengetahui perkembangan kinerja anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2018-2020 diharapkan pelaksanaan anggaran belanja kedepannya semakin baik dan optimal.

2. Manfaat Teoritis

a. Dapat menambah literatur mengenai kinerja anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2018-2020.
b. Untuk menambah wawasan bagi peneliti tentang kinerja anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2018-2020.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada ruang lingkup Laporan Keuangan Politeknik pelayaran Malahayati Aceh tahun anggaran 2018-2020, dengan unit analisisnya adalah kinerja anggaran belanja pada Instansi tersebut.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan manfaat bagi publik, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat diterima sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu proses yang relatif kecil. Saat ini sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan.

Menurut Halim Menurut Abdul (2018:252) Akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Pemerintah yang dimaksudkan dapat mencakup pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan Halim (2012:3) Akuntansi sektor publik adalah sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu umtuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolahan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan department dibawahnya. Kemudian Wiratna (2015:1). mengemukakan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi lembaga tinggi Negara.

2.1.2 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Halim (2012:5) menyebutkan karakteristik akuntansi sektor publik sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak berorientasi laba.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
5. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca.
6. Motif mencari laba bukan merupakan orientasi utama. Karena orientasi utama adalah peningkatan mutu layanan ,sehingga laba bukan merupakan orientasi utama yang ingin dicapai sehingga tidak diadakan penghitungan dan pelaporan laba.
7. Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, dan kepemilikan tidak dibuktikan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbeliakan. Karena segala yang bersifat pribadi tidak ditemui dalam organisasi sektor publik.

8. Sumber keuangan yang diberikan warga negara tidak secara langsung berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya warga negara membayar pajak kepada pemerintah, warga negara tersebut tidak secara langsung memperoleh layanann dari pemerintah.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepada daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan Keuangan yang terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Neraca
d. Laporan Operasional
e. Laporan arus Kas
f. Laporan Perubahan Ekuitas
g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 periode pelaporan.

a. Laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.Terhadap unsur-unsur tersebut masing-masing didefinisikan sebagai berikut :
    1. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran bendahara umum daerah yang mengurai ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperboleh pembayarannya kembali. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan, maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk penutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah daerah.

b. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut ini:

1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka Panjang
6. Aset tetap
7. Kewajiban jangka pendek
8. Kewajiban jangka Panjang
9. Ekuitas dana

c. Laporan arus kas atau Aliran kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan

saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang tercakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas terdiri dari penerimaan yang masuk ke bendahara umum daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum daerah.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan didalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Adapun hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapian kinerja keuangan selama satu tahun pelaporan.
3. Menyajikan informasi tentang dasarpenyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian secara wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

2.1.4 Fungsi Dan Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut soedjipto dan sudi (2015:61) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan pengelolaan *(compliance and stewardship).*
   Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah diterapkan.
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif *(accountability and retrospective reporting).*
   Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah diterapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
3. Perencanaan dan informasi otorisasi *(planning and authorization information).*
   Laporan keuangan berfungsi memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa mendatang. Laporan keuangan berfungsi memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
4. Kelangsungan organisasi *(viability).*
   Laporan keuangan berfungsi membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa mendatang.
5. Hubungan masyarakat *(publicrelation).*
   Laporan keuangan berfungsi memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan

berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran *(source of facts and figures).*
   Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

2.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) menyatakan bahwa Penyusunan laporan keuangan harus dihasilkan melalui suatu sistem dan prosedur yang lazim. Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pealporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang data dilakukan secara manual atau mengguakan aplikasi komputer.

Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas auntansi yang menyelenggarakan system akuntansi pemerintah daerah. System akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan daerah (SKPKD) dan system akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahan Keuangan Satuan Kerja Perangakat Daerah (PPK-SKPD).

2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2015:43) Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak–pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan. Sistem Akuntansi keuangan daerah menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip–prinsip akuntansi yang berterima umum.

Sedangkan Renyowijoyo (2017:77) menjelaskan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur, dan donator, analis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

2.4 Kinerja

2.4.1 Pengertian Kinerja

Secara umum definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi.

Secara terminologi pengertian kinerja dapat dijelaskan bahwa Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok melakukan sesuatu kegiatan, menyempurnakannya sesuai tanggungjawabnya dengan hasil yang diharapkan. Menurut Wirawan (2014;105) Kinerja adalah Mengoptimalkan sumber daya manusia menjadi fokus utama organisasi dalam meningkatkan kinerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam rangka memperoleh kinerja yang baik. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian, karena organisasi dapat menetapkan *reward & punishment*.

Tujuan sistem pengukuran kinerja yaitu untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, menyeimbangkan ukuran kinerja finansial & nonfinansial, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan dibawah, serta memotivasi pencapaian *goal congruence,* alat mencapai kepuasan individu maupun kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai

kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi pencapaiam kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & Punishment)* secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan memastikan bahwa pengambilan dilakukan secara objektif.

Kemudian Rivai dan Basri (2014:17). Definisi ini mengandung pengertian bahwa kinerja adalah prestasi yang dicapai dan merupakan hasil kerja seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjannya sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Menurut Mangkunegara (2016:67) berpendapat bahwa kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Perilaku individu di dalam organisasi menghasilkan sesuatu yang berkuantitas dan kualitas individu dan organisasi.

Sedangkan menurut Fahmi (2016:2) Kinerja didefinisikan sebagai suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan melaksanakan tugas serta kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

2.4.2 Pengertian Kinerja Anggaran

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perpres No. 29 Tahun 2014), dijelaskan bahwa kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Lebih lanjut dijelaskan keluaran *(output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan, hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan, dan program adalah penjabaran dari kebijakan.

Mahmudi (2017:6) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Bastian (2017:275) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja adalah manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan seecara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Mardiasmo (2016:121) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu slrategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran

kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward* dan *punishment system*.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan.

2.4.3 Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan atau pegawai dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah:

a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
c. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

d. Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:
    1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
    2. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
    3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.4.4 Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi, secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
b. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
d. Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada.
e. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
f. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.5 Anggaran

2.5.1 Pengertian anggaran

Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

Menurut Safitri (2016:104) Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi

penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Kemudian Menurut Indra Bastian (2020:91) anggaran adalah rencana operasi keungan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. kemudian menurut Rahayu dan Rachman (2013:4) anggaran adalah alat pernecanaan dan pengendalian.

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2019:78) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang.

2.5.2 Tujuan Anggaran

Penyusunan anggaran berurusan dengan masa depan. Tujuan penyusunan

anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa mendatang. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Safitri (2016:105) tujuan penyusunan anggaran adalah :

a. Untuk menyatakan harapan/sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen.
b. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan.
c. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.
d. Untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya.
e. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.

Berikut adalah tujuan-tujuan lainnya yang terkait dengan penyusunan anggaran menurut Sasongko dan Parulian (2015:3):

1. Perencanaan
   Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
2. Koordinasi
   Anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian di dalam perusahaan.
3. Motivasi
   Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
4. Pengendalian
   Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2013:19), antara lain adalah sebagai berikut:

a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
c. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
d. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan di perusahaan.

2.5.3 Fungsi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2019:63) menyebutkan fungsi anggaran secara umum dapat dibagi menjadi :

1. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Anggaran sebagai alat pengendaliaan memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal Pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atau penggunaan dana publik.
5. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pencapaian anggaran.
7. Anggaran sebagai alat untuk emotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomi, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, artinya masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

2.6 Analisis Menilai Kinerja Keuangan Negara

Halim (2013:25) berpendapat bahwa untuk mengukur kinerja keuangan Negara yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, akuntabilitas, analisis rasio terhadap APBD perlu dilakasanakan dan hasil dari rasio tersebut dapat digunakan :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.7 Definisi Kinerja Anggaran

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perpres No. 29 Tahun 2014), dijelaskan bahwa kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Lebih lanjut dijelaskan keluaran *(output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan, hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan, dan program adalah penjabaran dari kebijakan.

Bastian (2017:329) mendefinisikan kinerja sebagai kinerja dikatakan sebagai sebuah hasil *(output)* dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan *(input)*. Selanjutnya kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Kemudian menurut Mardiasmo (2015:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran

finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Sedangkan Halim (2016:43) anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Jadi pengertian anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial.

Menurut Adisasmita (2014:33) Pengukuran kinerja realisasi anggaran belanja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Perpres No. 29 Tahun 2014 pengukuran kinerja anggaran merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang telah dicantumkan dalam lembar atau dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar atau dokumen perjanjian kinerja.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

2.8 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2.8.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Menurut Mahsun (2016:145) menyatakan bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan beberapa program kedalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkrit. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Analisis adalah penyelidikan mendalam tentang sesuatu dengan memaparkan data atau fakta yang ada untuk kemudian dicari keterkaitan antara data-data tersebut.

Menurut Wiratna (2015:57) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (Pusat atau Daerah) yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan". Secara sederhana laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara

tersanding untuk periode tertentu" Analisis laporan realisasi anggaran adalah mengkaji secara mendalam tentang laporan realisasi anggaran yang telah disusun oleh pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan realisasi anggaran tersebut.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran menurut PSAP Nomor 02 adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manfaat informasi realisasi anggaran yaitu menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi transfer, surplus/defisit dan realisasi pembiayaan dari satu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

2.9 Belanja

2.9.1 Pengertian Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari Belanja pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi basil, Bantuan keuangan, Belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja modal.

Mahmudi (2016:155) Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Kaeran sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengewasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Menurut Rahmawati (2012:15) belanja daerah adalah belanja daerah yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan belanja tidak langsung yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program.

Purnomo (2015:43) menjelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah menurut organisasi disesuikan dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah daerah. Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas:

a. Belanja Pegawai
   Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Belanja Bunga
   Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang *(principal outstanding)* berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
c. Belanja Subsidi
   Belanja subsidi digunakan untuk menganggarakan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
d. Belanja Hibah
   Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
e. Bantuan Sosial
   Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
f. Balanja Bagi Hasil
   Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu.
g. Bantuan Keuangan
   Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.
h. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Sedangkan belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Kelompok belanja ini terdiri atas:

a. Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
c. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.10 Pengukuran Rasio Keuangan Belanja

1. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pengukuran kinerja anggaran juga dapat dilihat dengan menggunakan analisis pertumbuhan belanja yang bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Menurut Mahmudi (2016:142) analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cukupan

layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pertumbuhan Belanja t} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun t} - \text{Realisasi Belanja Tahun t} - 1}{\text{Realisasi Belanja Tahun t} - 1} \text{x } 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016:142)

2. Analisis Belanja Operasional Terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Rasio belanja operasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Negara} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja}} \text{x } 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016:142)

3. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Negara

Pengklasifikasian belanja modal adalah klasifikasi berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati atas belanja tersebut. Rasio belanja modal dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Belanja\ Modal = \frac{\text{Reaalisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016:142)

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efesiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standart baku untuk rasio ini. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016:142)

5. Rasio Efektivitas Belanja

Konsep efektifitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektifitas juga dapat berarti kegiatan yang telah diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif.

Menurut Halim (2014:271) mengatakan bahwa Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan

pendapatan untuk belanja yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Negara. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan Negara yang semakin baik. Kemudian Adisasmita (2016:170) mendefinisikan konsep efektifitas adalah suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai dengan tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa jauh target yang telah dicapai maka perlu dilakukan pengukuran efektifitas, dengan rumus yang dapat digunakan yaitu:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Adisasmita (2016:170)

Pengukuran kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan konsep efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin besar nilai rasio yang diperoleh atau semakin besar target yang direalisasi, mengindikasikan bahwa semakin efektif kinerja anggaran pada suatu instansi pemerintahan, begitu juga sebaliknya.

2.11 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu Wahyuniar (2017) melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil kinerja keuangan pendapatan daerah secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini di buktikan (a) Pendapatan Daerah rata- rata 100%, (b) Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata- rata positif 52.92%, (c) Rasio Keuangan Pendapatan Daerah di lihat dari Derajat Desentralisasi menunjukkan rata- rata 5,17% (rendah), rasio Ketergantungan Keuangan Relatif tinggi rata-rata 77,31%, Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah secara umum rasio efektifitas rata-rata 113.45% dan rasio efisiensi rata-rata di atas 10%, (d) Derajat Konstribusi BUMD mencapai angka rata-rata 0.4%. Hasil kinerja keuangan belanja daerah secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini di buktikan (a) Belanja Daerah rata-rata dibawah 100%, (b) Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami perumbuhan rata-rata 16.10%,dan (c) Rasio Keserasian Belanja Daerah di lihat dari Rasio Belanja Operasi menunjukkan rata-rata 76.95%, Rasio Belanja Modal rata-rata 19.64% (d) Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata-rata di bawah 100%.

Selanjutnya Rusdi (2018) melakukan penelitian tentang Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektif pendapatan dari pemerintah Kab. Enrekang Tahun anggaran 2015-2017 belum mencapai target namun sudah mencapai kategori efektif karena berada pada predikat 90%-100%, hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah realisasi

anggaran pendapatan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditargetkan pada tahun anggaran 2015-2017 yaitu sebesar 97,17%, 93,55% dan 94,62%. Tingkat efisien belanja dari pemerintah daerah Kab. Enrekang periode 2015-2017, Pemerintah kabupaten Enrekang dinilai mampu menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien, hal ini terlihat dari tidak adanya angka yang melebihi anggaran belanja, yang mampu menghemat anggaran belanja sebesar 26,08%, 15,13%, 41,05%.

Kemudian Sastri (2019) melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal DalamLaporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Analisis Varians BelanjaUntuk tahun 2016 dan tahun 2017 kinerjanya menurun, disebabkan anggaran belanja modal yang sudah direncanakan di alihkan ke belanja barang dan jasa dan dialihkan ke hutang pemerintah sehingga kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara belum mampu memanfaatkan anggarannya dengan baik. Kinerja anggaran belanja modal dilihat dari keserasian belanja Dilihat dari proporsinya kinerja kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dikatakan belum mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan kegiatan pembangunannya dikarenakan porsinya belum mampu mencapai porsi pada umumnya. Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Pertumbuhan Belanja Walaupun pertumbuhan belanja mengalami fluktuasi dan pada tahun 2015 pertumbuhannya bernilai negatif disebabkan karena menurunnya anggaran belanja modal karena minimnya realisasi namun pertumbuhan belanja

cenderung bernilai positif. Jadi kinerja anggaran belanja modal dilihat dari pertumbuhan belanja modal kinerjanya sudah baik. Kinerja Anggaran dilihat dari rasio efesiensi belanja dari tahun 2014-2017 realisasi anggaran belanja modal tidak ada yang melebihi anggaran belanja modal, ini menunjukkan bahwa kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan penghematan atas anggaran dan hal ini juga didukung dari hasil wawancara bahwa realisasi anggaran harus sesuai dengan budget anggaran yang disediakan maka kinerja anggaran belanja modal dilihat dari rasio efesiensi belanja kinerjanya dikatakan sudah baik.

Selanjutnya Riska (2020) melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan analisis varians belanja secara keseluruhan pemerintah daerah Kabupaten Wajo pada tahun 2017 menunjukkan nilai sebesar Rp.44,737,783,686.80,- dan tahun 2018 sebesar Rp.93,628,516,915.03,-. Hal ini berarti bahwa realisasi belanja tidak melebihi anggaran belanja sehingga dapat dikategorikan baik. Namun pada tahun 2019 analisis varians belanja menunjukkan nilai sebesar Rp.19,000,856,011.43,- yang berarti bahwa realisasi belanja lebih besar dari pada anggaran belanja, terlihat bahwa adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan belanja diketahui bahwa pertumbuhan belanja pemerintah daerah Kabupaten Wajo pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 adalah negatif atau lebih kecil dari tahun sebelunya yaitu sebesar Rp.130,340,268,968.51,-. hal ini berarti bahwa pada tahun tersebut pemerintah daerah Kabupaten Wajo belum

mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Sedangkan pertumbuhan belanja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah positif atau lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.144,355,558,406.09,- hal ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Wajo telah mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya dari tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis keserasian belanja yaitu rasio belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2017 menunjukkan rasio sebesar 27,90% proporsinya melebihi dari 5-20%, hal ini menunjukkan adanya kinerja yang kurang baik karena melebihi dari proporsi belanja. Pada tahun 2018 menunjukkan rasio sebesar 17,80%. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang baik karena masih berada dalam proporsi belanja yaitu antara 5-20%. Pada tahun 2019 menunjukkan rasio sebesar 28,67% melebihi dari proporsi belanja. Berdasarkan rasio efisiensi belanja secara keseluruhan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan adaya penghematan anggaran yang dilakukan pemeritah karena tidak melebihi dari 100% yaitu sebesar 96,74% dan 92,76%. Sedangkan pada tahun 2019 menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran melebihi 100% yaitu sebesar 101,44% yang termasuk dalam kategori tidak efisien.

Sedangkan Ramadhani (2021) melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Permerintah Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari Varians Pendapatan Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum dapat dikatakan kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi APBD Kota Samarinda sebesar 1,17%, maka hipotesis ditolak. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Kota Samarinda dilihat dari Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum mengalami fluktuasi (naik turun) Kinerja Keuangan Pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	perbedaan

positif meningkat yaitu 16,75%, maka hipotesis diterima. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari Derajat Desentralisasi Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum dikatakan kurang baik dengan rata-rata sebesar 11,22%, maka hipotesis ditolak.

Adapun penelitian sebelumnya dapat juga dilihat secara rinci pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

1	Wahyuniar (2017)	Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai	1. Hasil kinerja keuangan pendapatan daerah secara umum dapat dikatakan baik. 2. Hasil kinerja keuangan belanja daerah secara umum dapat dikatakan baik.	Sama-sam melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu pada objek Kinerja Anggaran Belanja dan menggunakan rasio pertumbuhan belanja	Melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Sinjai dan lebih focus pada APBD dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi
2	Rusdi (2018)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang	1. Tingkat efektif pendapatan dari pemerintah Kab. Enrekang Tahun anggaran 2015-2017 belum mencapai target namun sudah mencapai kategori efektif. 2. Tingkat efisien belanja dari pemerintah daerah Kab. Enrekang periode 2015-2017,Pemerintah kabupaten Enrekang dinilai mampu menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien	Sama-sam melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu pada objek Kinerja Anggaran Belanja dengan unit analisisnya menggunakan rasio pertumbuhan belanja	Melakukan penelitian pada Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dan lebih focus pada APBD dengan unit analisisnya menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio selisih belanja, rasio efektif dan efisien PAD
3	Sastri (2019)	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara	1. Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Analisis Varians Belanja Untuk tahun 2016 dan tahun 2017 kinerjanya menurun, disebabkan anggaran belanja modal yang sudah direncanakan di alihkan ke belanja barang dan jasa dan dialihkan ke hutang pemerintah. 2. Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Pertumbuhan Belanja Walaupun pertumbuhan belanja mengalami fluktuasi. 3. Kinerja Anggaran dilihat dari rasio efesiensi belanja dari tahun 2014-2017 realisasi anggaran belanja modal tidak ada yang melebihi anggaran belanja modal	Sama-sam melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu pada objek Kinerja Anggaran Belanja Laporan realisasi Anggaran dengan menggunakan rasio pertumbuhan belanja	Melakukan penelitian pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, dengan unit analisisnya menggunakan rasio analisis varian belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja

Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1

Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	perbedaan

4	Riska (2020)	Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo	1. Berdasarkan analisis varians belanja secara keseluruhan pemerintah daerah Kabupaten Wajo pada tahun 2017 menunjukkan nilai sebesar Rp.44,737,783,686.80,- dan tahun 2018 sebesar Rp.93,628,516,915.03,-. Hal ini berarti bahwa realisasi belanja tidak melebihi anggaran belanja sehingga dapat dikategorikan baik. 2. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan belanja diketahui bahwa pertumbuhan belanja pemerintah daerah Kabupaten Wajo pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 adalah negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya. 3. Berdasarkan analisis keserasian belanja yaitu rasio belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2017 menunjukkan rasio sebesar 27,90% proporsinya melebihi dari 5-20%, hal ini menunjukkan adanya kinerja yang kurang baik karena melebihi dari proporsi belanja. 4. Berdasarkan rasio efisiensi belanja secara keseluruhan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan adaya penghematan anggaran yang dilakukan pemeritah karena tidak melebihi dari 100%.	Sama-sam melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu pada objek Kinerja Anggaran Belanja dengan menggunakan analisis pertumbuhan belanja	Melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dengan menggunakan analisis varian belanja, rasio keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja
5	Ramadhani (2021)	Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Permerintah Kota Samarinda	1. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari Varians Pendapatan Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum dapat dikatakan kurang baik. 2. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari Derajat Desentralisasi Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum dikatakan kurang baik dengan rata-rata sebesar 11,22%, maka hipotesis ditolak.	Sama-sam melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu pada objek Kinerja Anggaran Belanja san menganalisis tentang pertumbuhan anggaran	Melakukan penelitian pada Permerintah Kota Samarinda dengan menggunakan rasio varian pendapatan daerah, dan rasio derajat desentralisasi

Sumber: Data diolah (2022)

2.12 Kerangka Pemikiran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja pada sebuah Instansi tersebut.

Kinerja suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu instansi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. kinerja adalah tingkat keberhasilan melaksanakan tugas serta kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik

Untuk mengetahui kinerja anggaran belanja Peneliti menggunakan data pada Laporan Realisasi Anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh dengan menggunakan analisis pertumbuhan, Analisis Belanja Operasional Terhadap Total Belanja, Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja, Rasio Efisien Belanja. Untuk memberikan gambaran yang jelas sehubungan dengan kerangka pemikiran pada penelitian ini, akan di sajikan gambaran kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut.

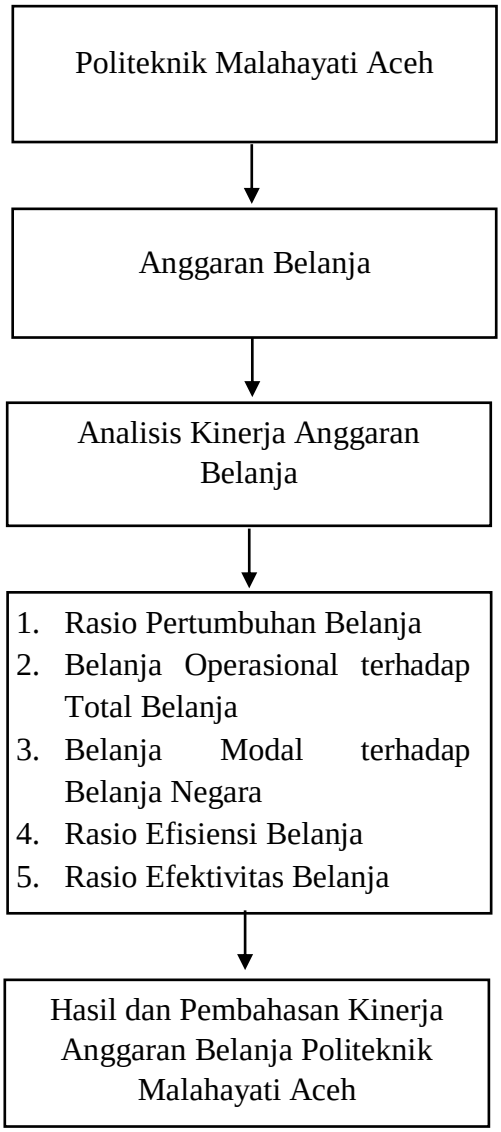

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2017:125) Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang akan digunakan sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya dikarenakan semua yang akan dilakukan telah terencana berdasarkan urutan penelitiannya. Terdapat empat aspek dasar desain penelitian yaitu tujuan studi, tingkat intervensi penelitian, situasi studi, unit analisis, dan horizon waktu. Aspek-aspek tersebut yaitu:

3.1.1 Tujuan Studi

Tujuan studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif, dengan tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi tentang Kinerja Anggaran Belanja Pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2018-2020.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (deskriptif) atau tingkat keterlibatan peneliti dalam penelitian ini adalah minimal, yaitu hanya mengumpulkan data dan kemudian menganalisisnya.

3.1.3 Horizon Waktu

Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah *one shot longitudinal,* yaitu pengumpulan data yang dilakukan hanya sekali kumpul.

Selanjutnya penelitian ini juga disebut studi *cross sectional*, yaitu data dikumpulkan pada suatu batas waktu tertentu yaitu pada Laporan Realisasi Anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2018-2020.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis atau tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian adalah pada tingkat Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2018-2020.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:193) terdapat 2 macam jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder berupa Laporan Keuangan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2018-2020. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tersebut yaitu dengan cara dokumentasi dan mengumpulkan data laporan keuangan periode tahun 2018-2020.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Nuryaman (2015:06) menyatakan bahwa analisis deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk memperoleh gambaran atau deskriptif tentang karakteristik tertentu dari suatu objek yang sedang menjadi perhatian dalam objek penelitian dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti berdasarkan angka-angka. Data laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah sebagai berikut.

1. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pengukuran kinerja anggaran juga dapat dilihat dengan menggunakan analisis pertumbuhan belanja yang bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Menurut Mahmudi (2016:142) analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cukupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pertumbuhan Belanja t} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun t} - \text{Realisasi Belanja Tahun t} - 1}{\text{Realisasi Belanja Tahun t} - 1} \text{x } 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016:142)

2. Analisis Belanja Operasional Terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Rasio belanja operasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Negara} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja}} \text{x } 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016:142)

3. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Negara

Pengklasifikasian belanja modal adalah klasifikasi berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati atas belanja tersebut. Rasio belanja modal dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Belanja\ Modal = \frac{\text{Reaalisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016:142)

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efesiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standart baku untuk rasio ini. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016:142)

5. Rasio Efektivitas Belanja

Konsep efektifitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektifitas juga dapat berarti kegiatan yang telah diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif.

untuk mengetahui seberapa jauh target yang telah dicapai maka perlu dilakukan pengukuran efektifitas, dengan rumus yang dapat digunakan yaitu:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Adisasmita (2016:170)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh

4.1.1 Sejarah Berdinya Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh

Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh berlokasi di jalan Laksamana Malahayati Aceh KM. 19 Gampong Durung, Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Perhubungan telah telah diresmikan pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 oleh Mentri Perhubungan dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB).

Pada acara peresmian dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah tanah oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMH) dan Gubernur Aceh. Tanah yang dihibahkan seluas 27,139 M^2 berlokasi di jalan Laksamana Malahayati Aceh KM. 19 Gampong Durung, Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 23 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh memiliki tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran pada jenjang pendidikan dan pelatihan kepelautan tingkat dasar dan menengah sesuai standar dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Pembangunan Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh telah selesai

dilaksanakan pada tahun 2013 (Pembangunan tahap IV (empat) yang merupakan pembangunan secara keseluruhan yang tercantum pada *Master Plan and Detail Enginering Design* (DED).

Sejak diresmikan pengoperasian pada tanggal 23 November 2012 sampai dengan tahun 2014, Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh telah berhasil mencatat capaian kinerja pelayanan diklat yang cukup signifikan. Capaian kinerja dimaksud berupa *outcome* berbagai kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana meliputi: jumlah pendaftar diklat yang meningkat menunjukkan animo masyarakat yang tinggi dalam merespon keberadan BP2IP Malahayati sebagai lembaga diklat pelayaran. Jumlah diklat kepelautan baik diklat kompetensi maupun diklat keterampilan juga menunjukkan perkembangan positif maupun dari segi geografis aceh berada di ujung barat wilayah Indonesia.

Kondisi di atas menjadi acuan dan dasar pemikiran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh dalam pengembangan eselonisasi organisasi dan eselon III/b menjadi eselon III/a sehingga terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2014 Perubahan Atas peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh. Pada tahun 2015 Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh menjadi sebuah Badan Layanan Umum melalui Keputusan Menteri keuangan Nomor 1271/KMK.05/2015. Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh menetapkan target kinerja BLU Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh dengan bimbingan Direktorat Pembinaan PK-BLU Kementrian Keuangan.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM . 90 Tahun 2017 Tanggal 28 September 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh secara administratif di bina oleh Sekteraris Badan Pengembangan Suber Daya manusia Perhubungan (BPSDM Perhubungan), dan secara teknis operasional di bina oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDM Hubia). Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh di pimpin oleh seorang kepala. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelaksana teknis fungsional dan manajerial di bidang kepelautan tingkat dasar dan menengah sesuai dengan peraturan nasional dan international. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dari program.
b. Pelaksanaan urusan dari keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, tata usaha, hubungan masyarakat dan hokum.
c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepelautamn tingkat dasar dan menegah.
d. Pelaksanaan pembimbingan dan pengembangan peserta pendidikan dan pelatihan.

e. Pelaksanaan sertifikasi profesi kerja di bidang kepelautan tingkat dasar dan menengah.
f. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
g. pelaksanaan pengembangan usaha dan kerja sama .
h. pelaksanaan pemeriksaan intern.
i. pengelolaan unit-unit penunjang pendidikan dan pelatihan.
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

4.1.3 Visi dan Misi Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh

Dalam melaksanakan tugas dan diklat kepada masyarakat, Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh menetapkan visi dan misi sehingga dalam tugas dan fungsi pelayanan bisa dilaksanakan secara optimal.

1. Visi

   Dengan ditetapkannya visi Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh "menjadi lembaga diklat pelayaran unggulan, dengan menyediakan layanan diklat berkualitas berstandar nasional dan international kepada masyarakat"

2. Misi

   Dengan misi yang di miliki Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh memiliki gambaran hal yang seharusnya dilaksanakan, sehingga sesuatu yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih mudah untuk dipahami pada misi yang ada.

   Kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh Politeknik Pelayaran malahayati Aceh, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh memenuhi kebutuhan, tertuang di dalam misi Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebagai berikut:

a. Mewujudkan Lulusan Diklat Pelayaran yang prima, professional, dan beretika, memiliki daya saing yang tinggi di dunia kerja pada sub sektor transportasi laut baik di dalam maupun di luar negeri.
b. Menciptakan situasi belajar yang kondusif, efektif dan inofatif yang didukung sarana dan prasarana diklat berbasis teknologi mutakhir sehingga mampu merangsang motivasi peserta diklat untuk berhasil dalam menyelesaikan tugas menuntut ilmu.
c. Membangun manajemen mutu organisasi secara bertahap dengan peningkatan kapasitas seluruh sumber daya lembaga diklat secara terus menerus guna memperoleh kinerja pelayaran kinerja pelayanan organisasi yang berkualitas.
d. Membangun jejaring kerja dengan para stakeholder dunia usaha dan industri subsektor transportasi laut dalam rangka pemberian kontribusi dunia usaha kepada leberhasilan pencapaian tujuan pendidikan dan pelatihan.

4.1.4 Budaya BLU Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh

Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, semua operasional organisasi dijalankan dengan mengikuti standar operasional; danm prosedur (SOP) yang di susun berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas serta mampu merespon perubahan-perubahan serta mengacu pada standar mutu baik nasional maupun international.

Adapun nilai dasar Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah:

1. Korporasi
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Kerjasama tim
5. Kualitas dan
6. Transparansi

4.1.5 Stuktur Organisasi Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh

Struktur organisasi merupakan salah satu cara untuk suatu langkah awal sebelum ada suatu kegiatan instansi untuk mencapai suatu tujuan instansi. Dengan adanya struktur organisasi maka pengelompokkan kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 90 Tahun 2017, terdiri dari:

a. Kepala
b. Satuan Pemeriksaan Intern
c. Subbagian Keuangan Dan Umum
d. Seksi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
e. Seksi sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan
f. Divisi Pengembangan Usaha dan Kerja Sama
g. Unit Penunjang, dan
h. Kelompok Jabatan Fuungsional

4.2 Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat memperoleh data-data yang diperlukan yaitu Data yang diambil adalah Laporan Realisasi Anggaran dari Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh.

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran
Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2018-2020

Uraian	Tahun Anggaran								
	2018			2019			2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara/Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumalah Pendapatan	**32,774,045,000**	**24,234,401,257**	**73,94**	**23,578,200,000**	**18,544,587,832**	**78,85**	**15,085,695,000**	**22,135,786,857**	**146,73**
Belanja	-	-	-	-	-	-	-		-
Belanja Pegawai	6,415,917,000	4,459,420,192	69,96	6,567,492,000	6,186,260,011	93,56	7,193,980,000	6,908,385,975	95,86

Belanja Barang	88,336,347,000	73,400,820,641	82,94	82,238,499,000	73,466,262,393	88,75	55,699,165,000	54,727,580,794	97,56
Belanja Modal	37,955,800,000	37,021,057,800	97,93	13,656,620,000	13,611,943,268	99,86	1,372,370,000	1,367,566,000	99,47
Jumlah belanja	**132,708,064,000**	**114,881,298,633**	**86,56**	**102,462,611,000**	**93,264,465,672**	**91,02**	**64,265,515,000**	**63,003,532,769**	**98,03**

Sumber : LRA Politeknik Malahayati Aceh Tahun 2018-2020

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggaran dan realisasi anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari Pendapatan dan Belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Tahun 2018 jumlah Pendapatan sebesar Rp.32.774.045.000,- dengan realisasinya sebesar Rp.24.234.401.257,- atau 73,94%, kemudian anggaran belanja sebesar Rp.132.708.064.000,- dengan realisasinya sebesar Rp.114.881.298.633,- atau 86,57%. Kemudian pada Tahun 2019 jumlah Pendapatan sebesar Rp.23.578.200.000,- dengan realisasinya mencapai Rp.18.544.587.832,- atau 78,65%. Kemudian anggaran belanja sebesar Rp.102.462.611.000,- dengan realisasinya Rp.93.264.465.672,- atau 91,02%. Sedangkan pada Tahun 2020 jumlah pendapatan sebesar Rp.15.085.695.000,- dengan realisasinya sebesar Rp.22.135.786.857,- atau 146,73%, anggaran belanja sebesar Rp.64.265.515.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 63.003.532.769,- atau 98,03%.

1.2.1 Analisis Pertumbuhan Belanja

Pengukuran kinerja anggaran juga dapat dilihat dengan menggunakan analisis pertumbuhan belanja yang bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Menurut Mahmudi (2016:142) analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan

penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cukupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pertumbuhan Belanja t} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun t} - \text{Realisasi Belanja Tahun t} - 1}{\text{Realisasi Belanja Tahun t} - 1} \text{x } 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016:142

Tabel 4.2
Pertumbuhan Belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh
Tahun 2018-2022

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2017	Pendapatan	23.014.125.000,-	22.939.480.292,-	0,99
	Belanja	128.511.444.000,-	117.313.724.416,-	0,91
2018	Pendapatan	32.774.045.000,-	24.234.401.257,-	73,94
	Belanja	132.708.064.000,-	114.881.298.633,-	86,57
2019	Pendapatan	23.578.200.000,-	18.544.587.832,-	78,65
	Belanja	102.462.611.000,-	93.264.465.672,-	91,02
2020	Pendapatan	15.085.695.000,-	22.135.786.857,-	146,73
	Belanja	64.265.515.000,-	63.003.532.769,-	98,03

Sumber: Data diolah (2022)

Pertumbuhan Belanja Tahun 2018:

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{114.881.298.633\text{-}117.313.724.416}{117.313.724.416} \text{x } 100\% = -2{,}73\%$$

Pada tahun 2018 realisasi anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah Rp. 114.881.298.633,- dan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 114.881.298.633,- atau -2,73%. hal ini menunjukkan

bahwa pertumbuhan anggaran belanja menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebesar -2,73%

Pertumbuhan Belanja Tahun 2019:

$$\text{Pertumbuhan Belanja}=\frac{93.264.465.672 - 114.881.298.633}{114.881.298.633}\text{x}100\%=-18,81\%$$

Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah Rp.93.264.465.672,- dan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 117.313.724.416,- atau –18,81%. hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan anggaran belanja mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar -18,81%.

Pertumbuhan Belanja Tahun 2020:

$$\text{Pertumbuhan Belanja}=\frac{63.003.532.769-93.264.465.672}{93.264.465.672}\text{x}100\%=-32,44\%$$

Sedangkan pada tahun 2020 realisasi anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah Rp.63.003.532.769,- dan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 93.264.465.672,- atau –32,44%. hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan anggaran belanja mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar -32,44%.

1.2.2 Analisis Belanja Operasional Terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja Negara yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis

dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Rasio belanja operasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Negara} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016:142)

Tabel 4.3
Belanja Operasional terhadap Total Belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun Anggaran								
	2018			2019			2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6,415,917,000	4,459,420,192	69,96	6,567,492,000	6,186,260,011	93,56	7,193,980,000	6,908,385,975	95,86
Belanja Barang	88,336,347,000	73,400,820,641	82,94	82,238,499,000	73,466,262,393	88,75	55,699,165,000	54,727,580,794	97,56
Total Belanja Operasional	**94.752.264.000**	**77.860.240.833**	**82,17**	**88.805.991.000**	**79.652.522.404**	**89,69**	**62.893.145.000**	**61.635.966.769**	**98,00**
Jumlah belanja	**132,708,064,000**	**114,881,298,633**	**86,57**	**102,462,611,000**	**93,264,465,672**	**91,02**	**64,265,515,000**	**63,003,532,769**	**98,03**

Sumber: Data diolah (2022)

Belanja Negara Tahun 2018:

$$\text{Belanja Negara} = \frac{94.754.264.000}{132.708.064.000} \text{ x}100\% = 71{,}40\%$$

Pada tahun 2018 anggaran belanja operasional pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah Rp. 94.752.264.000,- dan jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 132,708,064,000,- atau 71,40%. hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggaran belanja operasional pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Sebesar 71,40% .

Belanja Negara Tahun 2019:

$$\text{Belanja Negara} = \frac{88.805.991.000}{102.462.611.000} \text{ x } 100\% = 86{,}66\%$$

Pada tahun 2019 anggaran belanja operasional pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah Rp. 88.805.991.000,- dan jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 102,462,611,000,- atau 86,66%. hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggaran belanja operasional pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Sebesar 86,66% .

Belanja Negara Tahun 2020

Belanja Negara=$\frac{62.893.145.000}{64.265.515.000}$ x 100% = 97,86%

Pada tahun 2020 anggaran belanja operasional pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah Rp. 62.893.145.000,- dan jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 64,265,515,000,- atau 97,86%. hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggaran belanja operasional pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Sebesar 97,86% .

1.2.3 Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Negara

Pengklasifikasian belanja modal adalah klasifikasi berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati atas belanja tersebut. Rasio belanja modal dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016:142)

Tabel 4.4

Uraian	Tahun Anggaran

	2018			2019			2020		
	Anggaran	**Realisasi**	**%**	**Anggaran**	**Realisasi**	**%**	**Anggaran**	**Realisasi**	**%**
Belanja Modal	37,955,800,000	37,021,057,800	97,93	13,656,620,000	13,611,943,268	99,86	1,372,370,000	1,367,566,000	99,47
Jumlah belanja	132,708,064,000	114,881,298,633	86,57	102,462,611,000	93,264,465,672	91,02	64,265,515,000	63,003,532,769	98,03

Belanja Modal Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun 2018-2022

Sumber: Data diolah (2022)

Belanja Modal Tahun 2018:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{37.021.057.800}{132.708.064.000} \times 100\% = 27{,}89\%$$

Pada tahun 2018 realisasi anggaran belanja modal pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah sebesar Rp. 37,021,057,800,- dan jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 132,708,064,000,- atau 27,89%. hal ini menunjukkan bahwa jumlah realisasi anggaran belanja modal pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Sebesar 27,89% .

Belanja Modal tahun 2019:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{13.611.943.268}{102.462.611.000} \times 100\% = 13{,}28\%$$

Pada tahun 2019 realisasi anggaran belanja modal pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah sebesar Rp. 13,611,943,268,- dan jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 102,462,611,000,- atau 13,28%. hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggaran belanja operasional pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Sebesar 13,28% .

Belanja Modal 2020 :

$$\text{Belanja Modal} = \frac{1.367.566.000}{64.265.515.000} \times 100\% = 2{,}12\%$$

Pada tahun 2020 realisasi anggaran belanja modal pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah sebesar Rp. 1,367,566,000,- dan jumlah

anggaran belanja sebesar Rp. 64,265,515,000,- atau 2,12%. hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggaran belanja operasional pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Sebesar 2,12% .

1.2.4 Rasio Efisiensi Belanja

Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan anggaran belanja. Kinerja anggaran pemerintah dapat dikatakan efisien apabila semakin sedikit jumlah dana yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan. Kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efisiensi kurang dari 60% maka dinilai sangat efisien. Jika rasio di atas 100% makan dinilai tidak efisien. Semakin kecil rasio efisiensi artinya kinerja pemerintah semakin baik.

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efesiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standart baku untuk rasio ini. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016:142)

Tabel 4.5
Kriteria Tingkat Efisiensi

Rasio Efisiensi %	Kriteria
> 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Tabel 4.6
Efisiensi Belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran
2018	132,708,064,000	114,881,298,633
2019	102,462,611,000	93,264,465,672
2020	64,265,515,000	63,003,532,769

Sumber: Data diolah (2022)

Efisiensi Belanja tahun 2018:

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{114.881.298.633}{132.708.064.000} \times 100\% = 86{,}56\%$$

Pada tahun 2018 Efisiensi anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh dengan jumlah anggaran adalah Rp.132,708,064,000,- dan anggaran yang terealisasi Rp.114,881,298,633,- hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 86,56%. Rasio efisiensi antara 80% - 90% dapat dikatakan cukup efisien. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh menunjukkan kinerja cukup baik.

Efisiensi Belanja Tahun 2019:

Efisiensi Belanja= $\frac{93.264.465.672}{102.462.611.000}$ x100% = 91,02%

Pada tahun 2019 Efisiensi anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh dengan jumlah anggaran adalah Rp.102,462,611,000,- dan anggaran yang terealisasi Rp. 93,264,465,672,- hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 91,02%. Rasio efisiensi antara 90% - 100% dapat dikatakan kurang efisien. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh menunjukkan kinerja kurang baik.

Efisiensi Belanja Tahun 2020:

Efisiensi Belanja= $\frac{63.003.\ 532.769}{64.265.515.000}$ x 100% = 98,03%

Pada tahun 2020 Efisiensi anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh dengan jumlah anggaran adalah Rp.64,265,515,000,- dan anggaran yang terealisasi Rp. 63,003,532,769,- hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 98,03%. Rasio efisiensi antara 90% - 100% dapat dikatakan kurang efisien. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh menunjukkan kinerja kurang baik.

4.2.5 Rasio Efektivitas Belanja

Konsep efektifitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektifitas juga dapat berarti kegiatan yang telah diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif.

untuk mengetahui seberapa jauh target yang telah dicapai maka perlu dilakukan pengukuran efektifitas, dengan rumus yang dapat digunakan yaitu:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Adisasmita (2016:170)

Standar efektifitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria efektifitasnya sebagai berikut:

Tabel 4.7
Kriteria Tingkat Efektifitas

Rasio Efektifitas %	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 -100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Tabel 4.8
Efektivitas Belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Tahun 2018-2022

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja Langsung
2018	132,708,064,000	4,459,420,192
2019	102,462,611,000	6,186,260,011
2020	64,265,515,000	6,908,386,975

Sumber: Data diolah (2022)

Efektivitas Belanja tahun 2018:

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{4{,}459{,}420{,}192}{132.708.064.000} \text{ x } 100\% = 33{,}60\%$$

Pada tahun 2018 Efektivitas anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh dengan jumlah anggaran adalah Rp.132,708,064,000,- dan realisasi anggaran belanja langsung Rp.4,459,420,192,- hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 33,60%. Rasio Rasio Efektivitas antara <60% dapat dikatakan tidak efektif. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh menunjukkan kinerja kurang baik karena lebih rendah biaya pegawainya.

Efektivitas Belanja Tahun 2019:

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{6,186,260,011}{102.462.611.000} \text{ x}100\% = 60,37\%$$

Pada tahun 2019 Efektivitas anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh dengan jumlah anggaran adalah Rp.102,462,611,000,- dan realisasi anggaran belanja langsung Rp.6,186,260,011,- hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 60,37%. Rasio efektivitas antara 60%-80% dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh menunjukkan kinerja kurang baik.

Efektivitas Belanja Tahun 2020:

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{6,908,386,975}{64.265.515.000} \text{ x } 100\% = 100,74\%$$

Pada tahun 2020 Efektivitas anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh dengan jumlah anggaran adalah Rp.64,265,515,000,- dan anggaran yang terealisasi Rp. 6,908,386,975,- hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 100,74%. Rasio efektivitas >100% dapat dikatakan sangat

efektif. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh menunjukkan kinerja anggaran sangat baik.

1.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis kinerja Anggaran Belanja dengan menggunakan Analisis Pertumbuhan Belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh

Pengukuran kinerja anggaran juga dapat dilihat dengan menggunakan analisis pertumbuhan belanja yang bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun.

1. Tahun 2018

   Pada tahun 2018 pertumbuhan belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar -2,73% . hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan anggaran belanja menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Sebesar -2,73%.

2. Tahun 2019

   Pada tahun 2019 pertumbuhan belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar -18,81%. hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan anggaran belanja menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Sebesar -18,81%.

3. Tahun 2020

   Pada tahun 2020 pertumbuhan belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar -32,44%. hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan anggaran belanja menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Sebesar -32,44%.

Anggaran belanja yang sudah direncanakan sudah dapat dilaksanakan semestinya. Hal ini disebabkan karena proses perumusan anggaran belanja sudah di bahas dengan matang karena setiap tahunnya mengalami perubahan kinerja lebih baik dengan meminimalisir belanja.

4.3.2 Analisis kinerja Anggaran Belanja dengan menggunakan Analisis Belanja Operasional Terhadap Total Belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja Negara yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.

1. Tahun 2018

   Pada tahun 2018 anggaran belanja operasional pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar 71,40% dari jumlah anggaran belanja yang dianggarkan setiap tahunnya.

2. Tahun 2019

   Pada tahun 2019 anggaran belanja operasional pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar 86,66% dari jumlah anggaran belanja yang

dianggarkan setiap tahunnya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Tahun 2020

   Pada tahun 2020 anggaran belanja operasional pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar 97,56% dari jumlah anggaran belanja yang dianggarkan setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

4.3.3 Analisis kinerja Anggaran Belanja dengan menggunakan Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Negara pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh

Pengklasifikasian belanja modal adalah klasifikasi berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati atas belanja tersebut.

1. Tahun 2018

   Pada tahun 2018 anggaran belanja modal pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar 27,89% dari jumlah jumlah anggaran belanja yang setiap tahunnya.

2. Tahun 2019

   Pada tahun 2019 anggaran belanja modal pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar 13,28% dari jumlah anggaran belanja yang dibelanjakan setiap tahunnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Tahun 2020

Pada tahun 2020 anggaran belanja modal pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar 2,12% dari jumlah anggaran belanja yang dibelanjakan setiap tahunnya mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya.

4.3.4 Analisis kinerja Anggaran Belanja dengan menggunakan Rasio Efisiensi Belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh

1. Tahun 2018

Pada Tahun 2018 rasio efisiensi belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah 86,56%. Artinya Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh dinilai cukup efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiensinya 80%-90%. Hal ini berarti Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada tahun 2018 dinilai cukup baik.

2. Tahun 2019

Pada tahun 2019 rasio efisiensi belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah sebesar 91,02%. Artinya Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh dinilai kurang efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiensinya 90%-100%. Hal ini berarti Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada tahun 2019 dinilai kurang baik.

3. Tahun 2020

Pada tahun 2020 rasio efisiensi belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah sebesar 98,03%. Artinya Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh dinilai kurang efisien dalam pengelolaan anggaran belanja

dimana rasio efisiensinya 90%-100%. Hal ini berarti Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada tahun 2020 dinilai kurang baik.

4.3.5 Analisis kinerja Anggaran Belanja dengan menggunakan Rasio Efektivitas Belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh

1. Tahun 2018

Pada Tahun 2018 rasio efektivitas belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah 33,60%. Artinya Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh dinilai kurang efektif dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efektifitasnya <60%. Hal ini berarti Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada tahun 2018 dinilai kurang baik.

2. Tahun 2019

Pada tahun 2019 rasio efektivitas belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah sebesar 60,37%. Artinya Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh dinilai kurang efektif dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiensinya 60%-80%. Hal ini berarti Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada tahun 2019 dinilai kurang baik.

3. Tahun 2020

Pada tahun 2020 rasio efektivitas belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah sebesar 100,74%. Artinya Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh dinilai sangat efektif dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiensinya >100%. Hal ini berarti Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada tahun 2020 dinilai sangat baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh tahun anggaran 2018-2020. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis kinerja Anggaran Belanja dengan menggunakan Analisis Pertumbuhan Belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Pada tahun 2018 pertumbuhan belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar -2,73%. Pada tahun 2019 pertumbuhan belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar -18,81%. Sedangkan Pada tahun 2020 pertumbuhan belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar -32,44%.
2. Analisis kinerja Anggaran Belanja dengan menggunakan Analisis Belanja Operasional Terhadap Total Belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Pada tahun 2018 anggaran belanja operasional pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar 71,40% dari jumlah anggaran belanja yang dianggarkan setiap tahunnya. Kemudian Pada tahun 2019 sebesar 86,66%. Sedangkan Pada tahun 2020 anggaran belanja operasional pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar 97,56% dari jumlah anggaran belanja yang dianggarkan setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

3. Analisis kinerja Anggaran Belanja dengan menggunakan Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Negara pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Pada tahun 2018 anggaran belanja modal pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar 27,89% dari jumlah jumlah anggaran belanja yang setiap tahunnya. Pada tahun 2019 anggaran belanja modal pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar 13,28% dari jumlah anggaran belanja yang dibelanjakan setiap tahunnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 anggaran belanja modal pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh sebesar 2,12% dari jumlah anggaran belanja yang dibelanjakan setiap tahunnya mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya.
4. Tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh bahwa dari tahun 2018 termasuk kategori cukup efisien karena nilai rasionya berkisar antara 80-90%. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 termasuk kategori kurang efisien karena nilai rasionya berkisar antara 90-100%.
5. Tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh bahwa dari tahun 2018 termasuk kategori tidak efektif karena nilai rasionya berkisar <60%. Kemudian pada tahun 2019 termasuk kategori kurang efektif karena nilai rasio berkisar antara 60%-80%. Sedangkan pada tahuin 2020 termasuk kategori sangat efisien karena nilai rasionya berkisar antara >100%.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang

lebih berkualitas, berikut beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti bagi instansi terkait dan penelitian selanjutnya.

1. Untuk peneliti selanjutnya Agar menambah beberapa Objek penelitian lain. Objek tersebut merupakan kinerja, perubahan arus kas dan objek lainnya.
2. Selain menggunakan metode deskriptif peneliti selanjutnya juga bisa menggunakan metode *explanatori* dengan tujuan sampel penelitian yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo (2014). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah.*Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bastian, Indra (2017). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Edisi Ketiga).* Jakarta: Erlangga

Bastian, Indra. (2020). Manajemen Keuangan Publik. Jakarta: Andi

Fahmi, Irham. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung. Alfabeta.

Halim, Abdul. (2016). *Seri Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*.
Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik; Teori, Konsep & Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat,

Halim, Abdul. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta. Salemba Empat.

Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*, Di Yogyakarta: Godean.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN..

Mahmudi. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UUI Press.

Mahsun, Mohamad (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: BPFE

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, 2016, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*,
Bandung : PT Refika aditama

Mardiasmo (2015). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Cv. Andi.

Mardiasmo (2016). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Cv. Andi.

Mardiasmo. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:CV. Andi

Nafarin,Muhammad (2013), *Penganggaran Perusahaan*, cetakan Pertama, Jakarta:
Salemba Empat

Nuryaman. Christina, V.2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*: Teori dan Praktek. Bogor. Ghalia Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah*. (Diakses tanggal 30 Oktober 2021)

Peraturan Pemerintah PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang *tata cara penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara* (APBN)

Peraturan Pemerintah PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang *penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara* (APBN)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Purnomo (2015). *Ekonomi Energi Teori Dan Praktik*. Jakarta : LP3ES

Rahayu, Sri dan Rachman Andry. 2013. *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Bandung: Graha Ilmu.

Rahmawati, Maulidah (2012). *Akuntasi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Ramadhani, Suyatin. 2021. *Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Permerintah Kota Samarinda*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Renyowijoyo, Maindro. 2011. *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Nonlaba*.Jakarta: Mitra Wacana Media.

Riska. 2020. *Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran*
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar. Skripsi (Naskah Publikasi).

Rivai, Veithzal dan Basri, Mohd., Fawzi, Ahmad, 2014. *Performance Appraisal*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Rusdi. 2018. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang*. Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi (Naskah Publikasi).

Sasongko, Catur (2015). *Anggaran*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sastri, Peni Indah. 2019. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam Laporan*
Realisasi Anggaran (LRA) pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sumatera Utara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara Medan. Skripsi (Naskah Publikasi)

Savitri, Enni. 2016. *Penganggaran Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Sahila

Soetjipto, Sudi. 2015. *Akuntansi Pemerintahan RI Reformasi Keuangan Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Wahyuniar. 2017. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar. Skripsi (Naskah Publikasi).

Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Wirawan,2014. *Evaluasi kinerja sumber daya manusia*. cetakan pertama, Salemba Empat